

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Realisasi terhadap modernisasi China telah jauh dimulai sebelum pemerintahan Xi Jinping, yakni pada masa pemerintahan Deng Xiaoping dan telah mengalami fase transformasi yang cukup dramatis. Namun babak baru dalam upaya modernisasi militer China mulai terlihat di bawah Xi Jinping yang kala itu menjadi Ketua Komisi Militer Pusat pada november 2012 sampai terpilih menjadi Presiden China pada 14 Maret 2013.<sup>1</sup> Keberhasilan Xi Jinping dalam memuat kebijakan *open door policy* dengan menerapkan reformasi pasar terbuka secara lebih luas bagi investor dan perusahaan asing, pada saat itu membuat China mengalami peningkatan ekonomi yang cukup signifikan. Data menunjukkan bahwa China menjadi negara dengan pemegang devisa terbesar ketujuh dalam pasar saham di dunia dan menjadi salah satu pusat perbankan internasional,<sup>2</sup> sementara menurut prediksi CEBR (*Centre for Economics and Business Research*), China telah menetapkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,7% dari tahun 2021-2025 dan pada saat ini menempati negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.<sup>3</sup> Hal tersebut akhirnya mendorong China dalam meningkatkan kapasitasnya khususnya dalam pengembangan militer sebagai strategi jangka panjang China dalam

---

<sup>1</sup> Wuthnow Joel, "China's Military Modernisation". <https://www.eastasiaforum.org/2020/12/16/chinas-military-modernisation/> (02/03/2022, 20:02 WITA)

<sup>2</sup> Huang, Yiping, "Can Hong Kong Survive as an International Financial Centre", *A New Financial Market Structure in East Asia*, Edward Elgar Publishing, New York, 2006.

<sup>3</sup> Centre for Economics and Business Research, Chosun Ilbo – China's Economy Could Overtake U.S. Economy by 2030. <https://cebr.com/reports/trt-world-chinas-economy-surpasses-the-european-unions-for-the-first-time/> (02/03/2022, 23.10 WITA)

memperluas kekuatan nasionalnya, menggantikan aliansi dan kemitraan keamanan Amerika Serikat di kawasan dan merevisi tatanan internasional agar lebih menguntungkan bagi sistem otoriter Beijing dan kepentingan nasionalnya.<sup>4</sup> Sebagai salah satu upaya menggeser posisi AS sebagai satu-satunya hegemon, modernisasi militer dalam rangka memenangkan *war of position* terhadap Amerika oleh Xi Jinping juga semakin diperkuat.<sup>5</sup>

Kebijakan modernisasi yang dilakukan Xi Jinping menunjukkan eksistensi dan pengaruh negara tersebut baik di tingkat regional maupun internasional. Xi Jinping menunjukkan komitmennya melalui pernyataannya di Kongres Nasional ke-19 PKC (Partai Komunis China) pada Oktober 2017 dengan menetapkan tolak ukur untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan strategi rezim perdamaian dengan membuat beberapa prioritas seperti mendorong upaya reformasi militer dibanding para pendahulunya, menyelesaikan modernisasi PLA (*People's Liberation Army*) pada tahun 2035 dan menjadikannya sebagai kekuatan militer kelas dunia pada tahun 2049.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan ambisi yang kuat oleh China untuk menjadi kekuatan adidaya yang tentunya dapat mengancam keamanan negara-negara di kawasan Asia Timur. Modernisasi militer China didasari oleh tiga buah pilar reformasi dan modernisasi PLA. Pilar pertama adalah melaksanakan pembangunan, pengadaan, akuisisi sistem persenjataan modern dan peningkatan teknologi militer. Pilar kedua adalah reformasi sistem dan Institusi yang bertujuan

---

<sup>4</sup> Department of Defense (DoD), *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China* 2021. p.1

<sup>5</sup> Rafsanjani, Lalu Azhar. "Rivalitas Amerika Serikat (AS) dan China dalam Menjadi Security Orderer di Asia Timur." *Indonesian Journal of Global Discourse* 2.1 (2020): 27-44.

<sup>6</sup> Maizland Lindsay, "China's Modernizing Military". <https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-modernizing-military> (02/03/2022, 21:22 WITA)

untuk menciptakan profesionalisme di dalam tubuh angkatan bersenjata China. Terakhir, pilar ketiga adalah pembangunan doktrin dan strategi perang yang baru dengan mempersiapkan pertempuran dengan senjata berteknologi tinggi.<sup>7</sup>

Dalam upaya modernisasi militer, Xi Jinping melakukan reformasi besar-besaran melalui PLA dengan menciptakan struktur komando dan kontrol yang baru dengan mengganti sistem komando regional dengan sistem komando teater, membentuk pasukan pendukung strategis, meningkatkan pelatihan dan pengkaderan bagi pasukan militer, serta melakukan kolaborasi dengan latihan bersama.<sup>8</sup> Melalui kolaborasi ini, PLA diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya baik dalam bidang sains dan teknologi sehingga militer China mampu memasuki tahap intelegensi dan siap untuk masuk dalam medan perang yang lebih modern. Perubahan ini menjadi langkah awal untuk membentuk fondasi yang penting bagi kemampuan tempur bagi PLA, Xi Jinping diyakini mampu menggunakan pengaruhnya untuk mendorong perubahan kontroversial yang pada akhirnya menguntungkan efektivitas operasional PLA. Hasilnya, dengan berbagai gebrakan modernisasi militer China terbentuknya militer yang lebih terorganisir dalam mengimplementasikan kebijakan China di dalam negeri dan di kawasan.

Di kawasan Asia Timur, pengaruh dari upaya modernisasi militer China terus menunjukkan efek yang signifikan sehingga menunjukkan sejumlah tren keamanan regional yang meningkat sejak tahun 2014 terkait dengan sengketa wilayah maritim, ketegasan strategis China, proliferasi nuklir, serta pembangunan militer di

---

<sup>7</sup> Purwanto, Adi Joko. "Peningkatan Anggaran Militer Cina dan Implikasinya terhadap Keamanan di Asia Timur." *SPEKTRUM* 7.1 (2010).

<sup>8</sup> Department of Defense (DoD), *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2021*. p.1

kawasan.<sup>9</sup> Upaya China tersebut secara aktif membentuk dinamika keamanan regional dengan melihat peningkatan tren belanja militer dalam kawasan tersebut. Berdasarkan data yang dirilis oleh SIPRI (*Stockholm International Peace Research Institute*) anggaran belanja militer di kawasan tersebut menunjukkan grafik yang meningkat dari US\$. 323.324 Miliar pada tahun 2013 menjadi US\$.428.861 Miliar pada tahun 2020.<sup>10</sup> Ketegangan di kawasan yang terus meningkat menunjukkan semakin kompleksnya hubungan keamanan antar negara di kawasan. Kekhawatiran pembangunan militer, sengketa wilayah maritim, serta ketegangan strategis China yang terjadi terus memberikan ketegangan secara regional. Tren pengeluaran militer negara-negara di kawasan Asia Timur menunjukkan bahwa negara-negara yang terlibat dalam sengketa wilayah dan konflik dengan China telah meluncurkan program modernisasi militernya sehingga kompleksitas keamanan Asia Timur tidak terelakkan lagi.

Walaupun dalam berbagai macam kesempatan pemerintah China terus menekankan bahwa upaya modernisasi militer tersebut adalah salah satu bentuk dari upaya China untuk melindungi negaranya baik dari ancaman kedaulatan maupun ancaman keamanan, namun upaya tersebut telah menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara khususnya di kawasan Asia Timur. Menarik untuk dibahas berdasarkan latar belakang tersebut dengan melihat ambisi dari peningkatan militer China dan negara-negara di kawasan Asia Timur dalam modernisasi militer China di bawah masa pemerintahan Xi Jinping menunjukkan

---

<sup>9</sup> Duchâtel, Mathieu, Oliver Bräuner, and Katharina Seibel. "7. Trends in East Asian security." *SIPRI Yearbook*. SIPRI. Oxford: Oxford University Press. 2016.

<sup>10</sup> The World Bank Data, "Military expenditure (current USD) - East Asia & Pacific". <https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?locations=Z4> (02/04/2022, 23:24)

interkoneksi bagi kompleksitas keamanan kawasan yang perlu dijabarkan secara lebih komprehensif melalui komponen-komponen penyusun kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah “*Mengapa Modernisasi Militer China Era Pemerintahan Xi Jinping Memberikan Pengaruh terhadap Kompleksitas Keamanan di Asia Timur?*”

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara lebih komprehensif pengaruh modernisasi militer China selama masa pemerintahan Xi Jinping dan bagaimana modernisasi militer China yang terjadi dapat mempengaruhi dinamika bagi kompleksitas keamanan di kawasan Asia Timur dengan menggunakan kerangka pendekatan teori *Regional Security Complex Theory* (RSCT).

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah:

#### **A. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dalam analisis bagi modernisasi militer China yang saat ini masih dipimpin oleh Xi Jinping dimana kebijakan-kebijakan dalam hal modernisasi tersebut tentunya dapat mempengaruhi beberapa negara kunci, baik yang berada di dalam kawasan seperti negara Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, maupun

negara yang berada di luar kawasan tersebut yakni Amerika dimana keterikatannya dengan beberapa negara dalam kawasan tersebut menjadi pembahasan yang kompleks bagi penelitian ini. Dalam prosesnya, penelitian ini diharapkan mampu mengetahui perubahan kompleksitas keamanan Asia Timur terutama dari upaya modernisasi militer era pemerintahan Xi Jinping beserta kebijakan-kebijakannya menjadi salah satu faktor yang turut mewarnai dinamisasi kawasan di Asia Timur.

#### B. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih intelektual mengenai studi keamanan serta kompleksitas kawasan dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong lahirnya penelitian lain terkait topik yang sama mengingat isu keamanan di kawasan Asia Timur yang selalu dinamis dan kompleks dimana nantinya akan menarik untuk selalu dibahas.

#### **1.4 Literature Review**

Kajian-kajian dalam studi keamanan yang telah berfokus terhadap pembahasan di kawasan Asia Timur yang diakibatkan oleh perkembangan terkini dari China, utamanya terkait peningkatan postur militernya telah banyak dilakukan melalui konsep RSCT (*Regional Security Complex Theory*). Namun, penelitian yang dilakukan penulis dengan berfokus kepada kebijakan modernisasi di era pemerintahan Xi Jinping dan pengaruhnya terhadap dinamika kompleksitas keamanan di Asia Timur selalu menarik untuk dibahas sehingga perlu dilakukan analisis khusus untuk melihat dinamika tersebut secara lebih rinci.

Beralih kepada temuan pertama penulis dalam artikel jurnal yang berjudul “*China’s Grand Strategy under Xi Jinping: Reassurance, Reform, and Resistance*” yang ditulis oleh Avery Goldstein.<sup>11</sup> Penelitian ini cenderung bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis strategi besar China dalam masa pemerintahan Xi Jinping. Strategi besar yang dikembangkan oleh China di bawah pemerintahan Xi Jinping walaupun berbeda namun secara fundamental hal ini tidak melanggar strategi besar China yang telah dianut sejak awal tahun 1990. Pemerintah China menerapkan tiga upaya pendekatan yakni: Pertama, melanjutkan upaya sebelumnya untuk meyakinkan negara-negara lain tentang upaya baik dari kebangkitan China di mana China berusaha untuk memupuk keyakinan terhadap mereka bahwa pertumbuhan ekonomi militer China yang terus tumbuh tidak akan menimbulkan ancaman sehingga kebangkitan China menghadirkan peluang untuk saling menguntungkan, Kedua, mempromosikan reformasi kebangkitan China terhadap tatanan internasional melalui cara-cara yang awalnya bersifat retorika menjadi tindakan yang nyata. Pemerintah China menekankan bahwa mereka tidak berusaha untuk menggulingkan tatanan global yang ada, tetapi membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk melestarikan sistem yang menguntungkan banyak pihak, dan ketiga, di bawah pemerintahan Xi Jinping, China secara lebih tegas menolak tantangan terhadap kepentingan inti yang dilakukan oleh Partai Komunis China.

---

<sup>11</sup> Avery Goldstein, A., 2020. “China's Grand Strategy under Xi Jinping: Reassurance, Reform, and Resistance”. *International Security*, 45(1), pp.164-201.

Menurut analisis dari penulis tersebut, terlihat jelas bahwa Xi Jinping telah secara terbuka menyatakan bahwa transformasi militer China diperlukan untuk memastikan kepentingan negara dalam mewujudkan kekuatan militer kelas dunia pada tahun 2035. Akibatnya, China sekarang menghadapi rintangan yang lebih sulit untuk melanjutkan keterlibatan ekonomi yang mendalam dengan negara-negara maju dalam perekonomian secara global. Alih-alih berhasil menggalang dukungan untuk reformasi yang akan menopang tatanan ekonomi internasional terbuka yang penting bagi modernisasi negara itu, kebijakan luar negeri Xi Jinping telah mendorong mitra ekonomi utama mereka untuk mempertimbangkan kembali keterlibatan mereka dengan China. Hal itu memungkinkan Amerika Serikat bergerak untuk mengurangi keterlibatan dengan China karena gesekan dari skenario ini. China dibatasi untuk mengadopsi pendekatan yang lebih mandiri untuk membangun ekonomi berteknologi maju dan harus menyesuaikan diri dengan pola baru perdagangan dan investasi internasional dengan memperdalam keterlibatannya dengan negara-negara yang lebih terbatas dan kurang makmur. Karena kekuatan militer modern semakin membutuhkan pemanfaatan teknologi terdepan, hal seperti itu akan berisiko menempatkan China pada kerugian kompetitif yang berdampak buruk bagi keamanan nasionalnya.

Penelitian lainnya yang berjudul "*China's Great Power Identity and Its Policy on the Korean Peninsula in the Xi Jinping Era*,"<sup>12</sup> ditulis oleh Jongho Shin di mana penelitian ini menggunakan pendekatan konsep dari kebijakan besar China dengan

---

<sup>12</sup> Jongho Shin. "China's Great Power Identity and Its Policy on the Korean Peninsula in the Xi Jinping Era." *Pacific Focus* 33.2 (2018): 284-307.



menganalisis refleksi identitas kekuatan besar China pada masa pemerintahan Xi Jinping dalam kebijakannya di Semenanjung Korea. Selama masa pemerintahan di era Xi Jinping, China telah mengedepankan orientasi yang lebih agresif dan lebih percaya diri dalam kebijakan luar negerinya. Meskipun China tidak akan berani menantang tatanan politik ekonomi internasional yang dipimpin AS, setidaknya kebangkitan oleh China tidak terelakkan lagi. Atas dasar persepsi ini, para pemimpin China menganggap Semenanjung Korea tidak hanya sebagai lingkungan keamanan di mana *status quo* harus dipertahankan, namun juga sebagai wilayah di mana China akan menggunakan pengaruhnya yang meluas. Dari sudut pandang China, penting bagi China untuk mempertahankan atau memperluas pengaruhnya di Semenanjung Korea dan meruntuhkan dominasi AS di kawasan sebagai cara untuk mempersiapkan persaingan strategis melawan hegemoni dari Amerika Serikat. Untuk mempersiapkannya, China tidak hanya perlu mengembangkan hubungan strategisnya dengan Korea Selatan, namun untuk memastikan manajemen rezim Korea Utara yang stabil. Meskipun China telah menentang pengembangan nuklir Korea Utara dan berpartisipasi dalam rezim sanksi internasional terhadap Korea Utara karena alasan ini, nyatanya China masih memiliki sikap negatif dalam menjatuhkan sanksi yang mengancam rezim. Berdasarkan identitas kekuatan besarnya, China mengakui Semenanjung Korea sebagai bagian substruktural dari hubungannya dengan Amerika Serikat.

Penelitian ketiga dengan judul “*China, the United States, and order transition in East Asia: An economy-security Nexus approach*”<sup>13</sup> oleh Feng Liu dan Ruonan Liu. Dalam tulisannya, Liu membahas tentang adanya peningkatan pembangunan militer China selama pemerintahan Xi Jinping dan upaya ambisius untuk mempromosikan inisiatif regional dan globalnya, sementara di sisi lain, adanya strategi Indo-Pasifik yang dibawa oleh pemerintahan Trump dan perang dagang melawan China. Elemen-elemen ini membentuk hubungan yang kompetitif antara China dan AS dan menurunkan hubungan kooperatif di antara mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan tingkat persaingan strategis dan kepentingan yang saling bertentangan akan muncul antara kekuatan yang meningkat dan kekuatan yang mapan, terlepas dari bagaimana hubungan mereka. Karena itu, saat China dan Amerika Serikat memasuki fase baru persaingan strategis yang intensif, terdapat kemungkinan bagi kedua kekuatan besar untuk terlibat dalam persaingan destruktif. Tingkat persaingan antar negara tersebut juga secara signifikan dibatasi oleh beberapa faktor termasuk kesenjangan kekuatan yang masih besar, interdependensi dalam ekonomi, dan pencegahan nuklir. Selain itu, jika persaingan ketat China-AS saat ini berlanjut atau memburuk sejauh masing-masing pihak berupaya untuk mengembangkan blok regional eksklusif, negara-negara Asia Timur lainnya akan semakin merasa tertekan untuk bersekutu dengan Amerika Serikat atau China, hal ini akan mengakibatkan munculnya ketidakstabilan regional. Tulisan tersebut menggunakan pendekatan nexus keamanan dan ekonomi dengan mengintegrasikan

---

<sup>13</sup> Liu, Feng, and Ruonan Liu. "China, the United States, and order transition in East Asia: An economy-security Nexus approach." *The Pacific Review* 32.6 (2019): 972-995.

interaksi aktor-aktor regional baik di bidang ekonomi dan keamanan ke dalam kerangka kerja terpadu. Dari perspektif ini, terlihat bahwa tatanan regional Asia Timur ditopang oleh kombinasi rumit dari konfigurasi ekonomi dan keamanan regional yang dipengaruhi kekuatan negara besar tersebut.

Selanjutnya, penelitian keempat ditulis oleh M. Najeri Al Syahrin dalam judul “China versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya di Kawasan Asia Pasifik.”<sup>14</sup> Penelitian tersebut berupaya menggali isu rivalitas keamanan yang berlangsung antara negara China dan Amerika di kawasan Asia Pasifik di mana peningkatan pengaruh China di kawasan Asia Pasifik semakin tak terelakkan terutama di bawah pemerintahan Xi Jinping. China telah menjadi pusat gravitasi baru di kawasan karena ambisi yang sangat besar, China juga didukung oleh kekuatan ekonomi sehingga upaya strategi *rebalancing*<sup>15</sup> Amerika semakin sulit. Kesulitan yang dirasakan tersebut antara lain juga terlihat dari kompleksnya permasalahan China dengan Taiwan, nuklir Korea Utara, dan permasalahan teritorial maritim Laut China Selatan, di mana beberapa permasalahan tersebut dapat berimplikasi pada kehadiran militer Amerika di kawasan Asia Pasifik, hal ini membuat Amerika perlu membuat pilihan dilematis antara kepentingan

---

<sup>14</sup> M. Najeri Al Syahrin, 2018, “China versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya di Kawasan Asia Pasifik”. *e-journal.unair.ac.id* No. 1 Januari-Juni 2018: 145-163

<sup>15</sup> Strategi *rebalancing* merupakan bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah AS terutama dalam bidang strategi militer yang berusaha mengimbangi kekuatan China dengan kemampuan yang sudah mencapai Anti-Access/Area-Denial (A2/AD), dalam militer, A2/AD merupakan serangkaian kemampuan yang tumpang tindih di beberapa domain seperti Udara, Darat, Laut, EW, AI, Dunia Maya, dan Luar Angkasa, dengan tujuan tunggal untuk memaksakan maksimum gesekan pada kemampuan berperang musuh di semua spektrum. Baca lebih lanjut, Nick Impson, *The Next Warm War: How History's Anti-Access/Area Denial Campaigns Inform the Future of War*, Small Wars Journal, 2020, <https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/next-warm-war-how-historys-anti-accessarea-denial-campaigns-inform-future-war> (02/04/2022) 23:57 WITA)

domestiknya dan keunggulan militer di kawasan. Kepentingan China adalah berupaya membentuk tatanan politik dan keamanan baru di Asia agar dapat setara dengan Amerika yang selalu mendominasi kawasan.

Dalam paradoks dan kebijakan yang dibuat Amerika terlihat di mana Amerika selalu menempatkan China dalam posisi mitra strategis perdagangan dan kerja sama ekonomi internasional, namun di sisi lain juga dianggap menjadi ancaman baginya. Paradoks yang dibentuk Amerika terhadap China antara lain sejak kebijakan Asia Pivot pada masa Pemerintahan Obama, pengerahan pasukan militer Amerika secara permanen di Australia serta upaya Amerika untuk mendiskusikan masalah Laut China Selatan dalam forum multilateral *ASEAN Summit*, penguatan kapabilitas militer lima negara aliansi di kawasan Asia-Pasifik serta penyesuaian posisi pangkalan militer di sekitar wilayah China. Melihat strategi ini, sulit bagi Amerika untuk menyangkal bahwa kebijakan ini tidak mengarah kepada upaya pembendungan kekuatan China.

Dalam upaya Geostrategi dan Geoekonomi Negara Adidaya di Asia Pasifik, Amerika mampu memainkan peran hegemonik yang sentral di wilayah Asia Pasifik. Amerika mampu menjamin stabilitas keamanannya, serta membina aliansi dengan negara-negara lain dan kemitraan politiknya. Sementara di sisi lain, China mulai meningkatkan fokus strategis hubungan bilateral dan kebijakan luar negeri yang lebih berorientasi pada kepentingan geostrategi. Hal ini tentunya membuat adanya persaingan keamanan antara Amerika dan China yang menguasai wilayah Asia Pasifik. Penulis memandang dalam tatanan regional di masa depan kita akan menyaksikan lebih banyak peningkatan kekuatan China dalam kawasan regional,

apalagi dengan adanya kebijakan OBOR (*One Belt One Road*) di mana hal ini akan membuat AS semakin berusaha meningkatkan perannya dalam kawasan serta melakukan perimbangan terhadap China. Penulis berpendapat dengan terus melibatkan China untuk dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung sistem keamanan global dalam kawasan Asia Pasifik di mana kedepannya diharapkan mampu menurunkan eskalasi persaingan dan saling mengamankan berbagai kepentingan antara AS dan China.

Berikutnya adalah penelitian yang berjudul “Pengaruh Peningkatan Kekuatan Militer China terhadap Keamanan Stabilitas Regional Asia Timur,” yang ditulis oleh Laode Muhammad Fathun.<sup>16</sup> Penelitian ini berupaya menjelaskan fenomena-fenomena yang pernah terjadi di wilayah Asia Timur sehingga membuat China mengadakan peningkatan militer yakni dari segi alutsista, belanja militer dan personel yang mana dilakukan sebab adanya dilema keamanan yang pernah terjadi di masa lalu. Hal ini tentunya adalah sebuah dasar yang disebabkan oleh beberapa negara yang pernah berkonflik dengan China baik dalam perang yang bersifat kontemporer maupun perang dunia. Belanja militer yang selalu naik setiap tahun menunjukkan konsistensi China untuk mempertahankan keamanan. Penelitian ini dianalisis pada masa kepemimpinan Mao Xedong hingga masa pemerintahan Deng Xiaoping.

Dengan kondisi geopolitik bertetangga dengan musuh China seperti Jepang dan Korea Selatan menunjukkan bahwa China tidak akan membawa kesalahan di

---

<sup>16</sup> Laode Muhammad Fathun, 2016, *Pengaruh Peningkatan Kekuatan Militer Tiongkok terhadap Keamanan Stabilitas Regional Asia Timur* dalam *journal.unhas.ac.id* Vol.2 No.2 Juli 2016

masa lalu sebagai hal yang terulang. China menunjukkan upaya *deterrence* sebagai pencegahan terhadap negara yang pernah terlibat konflik dengannya seperti Jepang dan Korea. China dalam posisi dilemma keamanan sehingga meningkatkan kapasitasnya agar konflik dan perang tersebut tidak terjadi kembali. Disinilah *deterrence* itu berfungsi dengan penuh keyakinan China meningkatkan kapasitas militernya membuat respon Jepang pun meningkatkan kapasitas militernya yang tidak pernah terjadi selama satu dekade. Pemahaman dari strategi *deterrence* yang dilakukan oleh China tentunya mencoba meyakinkan negara-negara yang berada di kawasan tersebut bahwa segala upaya peningkatan kapasitas militer China telah memperhitungkan segala kerugian dari setiap serangan yang datang. Namun dengan bukti kepemilikan senjata modern seperti misil balistik dan nuklir tentu memungkinkan munculnya pukulan psikologi bagi negara-negara untuk melakukan sebuah agresi. China juga secara konsisten menjalin aliansi militer untuk mengimbangi poros barat oleh hegemoni Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan Australia dengan beraliansi bersama Rusia, Korea Utara dan Iran. Hal inilah yang membuat sewaktu-waktu timbulnya konflik terkait dengan keterlibatan banyak negara, serta dapat dilihat bahwa wilayah Asia Timur tergolong wilayah yang rentan dan jauh dari kata stabil sebab adanya berbagai macam negara yang memiliki egoisme dan mengutamakan kepentingan nasionalnya untuk menjadi hegemoni di wilayah Asia Timur.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dipaparkan, terdapat analisis yang berbeda terkait dengan dinamika kompleksitas keamanan di Asia Timur dan juga kebijakan negara besar yakni China di kawasan tersebut jika dibandingkan dengan

penelitian ini. Dalam penelitian pertama lebih berfokus terhadap strategi besar Xi Jinping secara keseluruhan yang nantinya berpengaruh terhadap tatanan secara global. Sementara penulis lebih berfokus terhadap kebijakan modernisasi militer China di bawah Xi Jinping dan dampaknya bagi dinamika di kawasan Asia Timur. Tulisan kedua menganalisis refleksi identitas kekuatan besar China pada masa pemerintahan Xi Jinping dalam kebijakannya di Semenanjung Korea, dan penelitian ketiga membahasnya melalui dominasi peran China dan Amerika di kawasan Asia Timur. Penelitian selanjutnya lebih fokus membahas secara lebih rinci dari isu rivalitas keamanan yang berlangsung antara negara China dan Amerika di kawasan Asia Pasifik, sementara bentuk penelitian terakhir yang condong terhadap peningkatan militer China secara khusus berdampak terhadap stabilitas regional di Asia Timur. Analisis penelitian terakhir menggunakan kacamata realisme seperti dalam teori *security dilemma* dan juga *national interest* sehingga stabilitas regional yang terjadi di kawasan cukup terlihat dalam pola hubungan *state to state* sementara dalam menggunakan pendekatan kerangka RSCT, analisis terhadap keadaan keamanan di kawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan dapat menguatkan seluruh peran dalam kompleksitas keamanan di kawasan tersebut sehingga implikasinya dapat mencakup kawasan secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, penulis berupaya untuk memberikan analisis yang lebih sistematis dengan berfokus terhadap kebijakan modernisasi selama kebijakan di masa pemerintahan Xi Jinping untuk memahami bagaimana pengaruhnya bagi kompleksitas keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur. Hal ini tentu menarik

mengingat penguatan kebijakan dari modernisasi di masa pemerintahan Xi Jinping terus mengalami reformasi dan komitmen untuk bangkit dan menjadi salah satu kekuatan di kawasan tersebut sehingga diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam kajian Keamanan Internasional.

## **1.5 Landasan Teori**

### **1.5.1 RSCT (*Regional Security Complex Theory*)**

Dalam melakukan penelitian ini, penting untuk memahami apa itu RSCT (*Regional Security Complex Theory*) atau teori kompleksitas keamanan kawasan. Desentralisasi keamanan dunia pasca Perang Dingin tidak dapat dipungkiri telah membawa kawasan-kawasan menentukan arahnya sendiri. Dalam tulisannya, Buzan dan Waever mendefinisikan bahwa setiap kawasan pasti memiliki keidentikan pada masalah keamanan sehingga menghasilkan interdependensi hingga menjadi fondasi terbentuknya suatu kompleksitas keamanan di kawasan. Pemahaman mengenai RSCT ini telah dijelaskan lebih mendalam oleh Buzan dan Weaver tahun 2003 yakni:

*“...a set of units whose major processes of securitisation, desecuritisation, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analysed or resolved apart from one another.”*<sup>17</sup>

Barry Buzan menjelaskan bahwa proses sekuritisasi maupun desekuritisasi suatu negara merupakan proses interaksi terhadap keamanan negara lain. Dengan demikian, untuk memahami bagaimana kompleksitas keamanan kawasan bekerja,

---

<sup>17</sup> Buzan and Waever, Buzan and Ole Waever, *Regions and Powers: The Structure of International Security* (New York: Cambridge University Press, 2003)



tidak cukup hanya dengan memahami keamanan satu negara saja, tetapi juga harus memahami keamanan negara lain, keamanan negara dalam kawasan dan interaksi keamanan negara-negara tersebut. Terdapat juga beberapa aspek lain yang berpengaruh dalam pembentukan kompleksitas keamanan kawasan, yaitu kondisi keamanan domestik yang tidak stabil, interaksi antar kawasan dan juga peran kekuatan global. Dengan memahami berbagai aspek tersebut maka kompleksitas keamanan kawasan bisa dijabarkan secara utuh dan komprehensif.

Agar dapat membedakan keamanan global dan keamanan kawasan, setidaknya terdapat beberapa cakupan proyeksi kekuatan negara, apakah dapat diperhitungkan atau tidak. Proyeksi kekuatan ini berkaitan dengan distribusi kekuatan yang berlangsung dari tingkat global hingga kawasan. Buzan mengidentifikasi struktur kekuatan ini dengan membaginya menjadi tiga kategori, yakni: (1) *super power*, (2) *great power*, (3) *regional power*.<sup>18</sup>

Istilah *super power* digunakan untuk aktor yang memiliki pengaruh yang kuat baik dalam tingkat global maupun regional melalui kapabilitas politik, ekonomi, dan militer yang sangat luas, dalam hal ini AS sebagai kekuatan utama dengan kemampuan memproyeksikan kekuatan dan ideologinya di seluruh belahan dunia. Di level berikutnya ada *great power*, dimana aktornya memiliki kekuatan militer, politik, dan ekonomi yang dipandang berpotensi untuk menyaingi *superpower* di masa depan seperti Uni Eropa, China, Rusia, dan Jepang. Terakhir, *regional power* dimana sebuah entitas harus diperhitungkan dalam lingkup kawasan untuk mendefinisikan polaritas dengan fokus kekuatan di kawasan seperti China yang

---

<sup>18</sup> Buzan and Waever, pp. 37-39

memiliki peranan penting di kawasan Asia yang berpusat pada satu *regional power* di kawasan tersebut. Melihat desentralisasi keamanan global ke kawasan, maka kekuatan *super power* dan *great power* memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi konstelasi keamanan di level kawasan dalam hal ini adanya Amerika, China, dan Jepang yang hadir dalam kawasan Asia Timur membuat terbentuknya dinamika kompleks keamanan kawasan tersebut<sup>19</sup>.

Menurut Buzan dan Waever, konfigurasi keamanan di kawasan sedikit banyaknya dipengaruhi oleh tatanan global, serta konfigurasi keamanan di kawasan memiliki sifat berkelanjutan seiring dengan adanya perubahan struktur kekuatan oleh aktor-aktor tersebut. Terdapat empat model konfigurasi keamanan kawasan yakni *Standard*, *Centred*, *Great Power* dan *Super Complexes* di mana setiap konfigurasi ini memiliki ciri-cirinya sendiri. *Standard* adalah kawasan anarki dan bersifat multipolar dengan ketiadaan kekuatan dominan di sana seperti dalam kawasan Asia Tenggara. Sedangkan *Centred* adalah penumpukan kekuatan pada satu negara di kawasan, contoh nyata adalah pengaruh Amerika di kawasan Amerika Utara. *Great power* terkonfigurasi dengan dua atau lebih kutub kekuatan di kawasan dengan *great power* sebagai sentral, misalnya kawasan Asia Timur. Terakhir, *Super Complexes*, di mana interaksi yang sangat kuat di dalam kawasan melebar ke sekitarnya dengan melibatkan aktor global, misalnya di kawasan Asia dengan Korea Utara dan Korea Selatan, rivalitas Jepang dan China, dan kehadiran Amerika Serikat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Buzan and Waever, p. 54

<sup>20</sup> Buzan and Waever, p. 55

Menurut teori regionalisme, fungsi RSCT adalah sebagai kerangka kerja yang mengatur studi empiris bagi keamanan regional. Terdapat dua macam tujuan yang dikembangkan dari teori tersebut yakni RSCT deskriptif dan RSCT prediktif. Salah satu tujuan RSCT deskriptif adalah menetapkan tolok ukur untuk mengidentifikasi dan menilai perubahan di tingkat regional, sementara RSCT prediktif merupakan kelanjutan dari RSCT deskriptif yang bertujuan untuk menemukan perubahan yang mungkin terjadi dalam RSCT dan memberikan skenario baru dalam kompleks keamanan kawasan. Teori ini menentukan apa yang harus dicari pada empat tingkat analisis dan bagaimana menghubungkannya. Keempat level tersebut adalah: isu keamanan negara-negara dalam kawasan, hubungan antar negara-negara dalam kawasan, interaksi kawasan dengan daerah tetangganya, serta peran kekuatan global di kawasan dengan adanya interaksi antara struktur keamanan global dan regional.<sup>21</sup>

Melalui RSCT deskriptif, kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur dapat dipahami dengan mengurai kerumitan antara hubungan dari seluruh variabel. Dengan menggunakan konsep RSCT sebagai kerangka untuk menganalisa pengaruh modernisasi militer China bagi dinamika keamanan kawasan Asia Timur, maka penulis akan memetakan secara garis besar terhadap variabel-variabel tersebut.

#### A. *Boundary*

Variabel tentang batas ini menjelaskan bagaimana perbedaan kompleksitas yang dihadapi masing masing negara yang berada dikawasan.

---

<sup>21</sup> Buzan and Waever, p. 53

Boundary merupakan sebuah batas yang mengacu pada batas fisik yakni batas geografi.<sup>22</sup> Pada variabel ini, penulis akan menentukan batasan-batasan geografis dari China terhadap Asia Timur sebagai variabel yang menentukan kompleksitas keamanan di kawasan Asia Timur. Kemungkinan dari adanya dinamika keamanan dapat dilihat dalam variabel ini, serta adanya pengaruh-pengaruh eksternal dari batas wilayah kawasan satu sama lain di negara-negara sekitar kawasan dapat diidentifikasi melalui variabel tersebut. China merupakan negara terbesar di Asia Timur yang berbatasan langsung dengan Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan dan Jepang. Sementara Taiwan di lepas pantai timur Cina, memiliki pemerintahan independen yang telah terpisah dari daratan Cina setelah Perang Dunia II.

Dalam ranah geografis, terdapat isu reunifikasi Taiwan dan China melalui One China Policy dan juga isu pengembangan nuklir Korea Utara meningkatkan tensi keamanan paling tinggi dalam sub kawasan Asia Timur. Instabilitas hubungan antar kawasan tersebut diperburuk oleh intensitas intervensi regional powers Cina, Jepang, dan Amerika Serikat sebagai superpower. Sementara aliansi Cina dan Korea Utara terbentuk bukan hanya karena dasar ideologis sosialis-komunisme, yang merupakan peninggalan payung pengaruh Uni Soviet selama Perang Dingin, namun juga didukung oleh kedekatan geografis antara keduanya. Selain itu, pengaruh Amerika Serikat di kawasan terutama dalam aspek asistensi kekuatan militer dengan Jepang dan Korea Selatan mendorong penguatan modernisasi militer negara-negara ini

---

<sup>22</sup> Buzan and Waever, p. 67

dalam memandang isu kawasan, khususnya isu peningkatan kapabilitas militer tiap-tiap negara di Asia Timur.

B. *Anarchic Structure*

Struktur anarki merupakan salah satu aspek penting dalam pembentuk kompleksitas keamanan kawasan adalah anarkisme kawasan. Anarkisme kawasan ditunjukkan dengan tidak adanya otoritas yang berwenang dalam proses penyelesaian secara damai apabila terjadi konflik di antara negara-negara kawasan tersebut. Anarkisme kawasan juga mengakibatkan minimnya dialog dan proses komunikasi dalam bentuk kerja sama atau perjanjian bilateral maupun multilateral sehingga mengakibatkan tingginya kecurigaan antarnegara yang terlibat.<sup>23</sup> Variabel dari struktur anarki akan mengukur tingkat anarkisme yang terjadi dengan melihat aktor-aktor utama yang menyebabkan adanya struktur anarki tersebut. Dalam hal ini, ketiadaan rezim perdamaian dalam kawasan Asia Timur menjadi problematika tersendiri bagi kawasan tersebut, yang menandai adanya kompetisi perlombaan senjata dan nuklir sebagai upaya perlindungan keamanan untuk menyeimbangkan kekuatan dari negara-negara lain di kawasan tersebut. Ketidakhadiran institusi regional di Asia Timur pada akhirnya memperlambat interaksi kooperatif antara negara-negara di dalamnya.

Walaupun negara-negara di Asia Timur terikat dalam interdependensi satu sama lain baik dalam ranah ekonomi, politik maupun ekologi tidak adanya wadah untuk menampung kepentingan kolektif membuat kompetisi regional

---

<sup>23</sup> Buzan and Waever, p. 63

tidak terarah. Kecurigaan akan lebih rentan tumbuh antara satu sama lain, membuat negara-negara di Asia Timur cenderung membangun kekuatannya untuk saling mendominasi, dibanding mendukung satu dengan lainnya. Hal ini mempengaruhi kerentanan isu kawasan, khususnya penguatan kapabilitas militer China melalui modernisasi militernya sebagai negara kuat di kawasan, lalu adanya intervensi Amerika Serikat sebagai superpower yang membentuk rivalitas dengan China. Hadirnya Amerika Serikat sebagai salah satu hegemoni dengan status quo memicu China dalam meningkatkan kapabilitas militernya dan menjadi counter hegemony khususnya dalam kawasan.

### C. *Polarity*

Polaritas merujuk pada adanya kutub kekuatan di dalam sebuah sistem internasional atau kawasan dimana kekuatan tersebut memiliki magnet bagi negara disekitarnya untuk membentuk aliansi. Dalam kondisi keamanan regional, polaritas terbagi menjadi unipolar, bipolar, dan multipolar.<sup>24</sup> Dalam RSCT, skema polaritas bisa berubah sesuai dengan kondisi power masing-masing negara dalam kawasan. Power negara yang dimaksud dalam polaritas ini pada dasarnya merujuk pada kapabilitas militer suatu negara, akan tetapi dalam tulisan ini dapat pula ditambahkan power dalam hal yang lain seperti kekuatan religiusitas suatu negara dan kekuatan ekonomi sehingga power yang dimiliki oleh suatu negara dalam suatu kawasan pasti akan memunculkan berbagai macam kemungkinan, pertama negara lain akan melihat hal tersebut sebagai suatu ancaman dan memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya,

---

<sup>24</sup> Buzan and Waever, p. 53

yang kedua adalah, negara yang tidak mampu untuk mengimbangi power tersebut memilih untuk bekerjasama atau beraliansi dengan negara yang memiliki power yang lebih besar. Hal ini yang kemudian membentuk polaritas dalam satu kawasan. Dikatakan unipolar jika ada satu negara dalam satu kawasan memiliki kapabilitas yang paling tinggi diantara negara tetangganya. Dan dikatakan sebagai multipolar saat ada dua atau lebih negara memiliki kapabilitas yang hampir sama.

Dalam variabel ini, penulis akan menjelaskan distribusi kekuasaan dalam kawasan Asia Timur. Distribusi kekuatan juga dipengaruhi oleh mekanisme penetrasi yang dapat terjadi ketika kekuatan luar melakukan aliansi keamanan dengan negara-negara dalam RSC. Distribusi kekuatan dalam Regional Security Complex berbasis pada logika anarki yang membuat negara-negara harus berhadapan dengan security competition. Distribusi kekuatan juga dipengaruhi oleh mekanisme penetrasi. Penetrasi terjadi saat adanya kekuatan luar melakukan aliansi keamanan dengan negara-negara dalam kompleksitas keamanan di kawasan. Komposisi kekuatan di kawasan Asia Timur tidak terlepas dari hubungan Cina-Jepang sebagai regional power, serta peran Amerika Serikat di kawasan sebagai superpower, ketiga kekuatan ini sangat mempengaruhi turbulensi terhadap stabilitas keamanan. Selanjutnya, skenario bipolaritas kawasan antara Cina dan Jepang menjelaskan komposisi distribusi kekuatan yang berperan dalam konflik-konflik yang cukup sentral di kawasan Asia Timur. Terlebih lagi aliansi Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan

otomatis membuat China semakin reaktif untuk melindungi aliansinya di kawasan yakni Korea Utara.

Menurut konsep dari logika keamanan, kondisi persaingan dalam balance of power yang terjadi antara negara great power di kawasan tersebut menjadi sebuah isu krusial yang memudahkan penetrasi kekuatan eksternal agar dapat menyebarkan pengaruhnya dalam kawasan melalui isu-isu tersebut. Dalam isu kawasan, salah satu syarat berlakunya RSCT adalah pola aliansi yang diakibatkan oleh adanya rivalitas kekuatan kawasan regional dalam sistem anarki sehingga membuka peluang penetrasi dari luar kawasan. Adanya penetrasi dari luar kawasan nantinya dapat menentukan arah kebijakan negara-negara small powers ataupun entitas yang ada dalam suatu lingkup regional.

#### D. *Social Construction*

Variabel konstruksi sosial ini meliputi pola hubungan amity dan enmity diantara negara negara yang berada dalam kawasan. Amity adalah hubungan yang dibangun berdasar pada rasa percaya, persahabatan, dan kerjasama. Hubungan yang baik ini bisa terjalin saat negara-negara dalam kawasan menghadapi isu yang sama dan sepakat untuk melakukan kerjasama. Hubungan yang dibangun dengan rasa kepercayaan, Kerjasama, dan persahabatan dapat membawa negara-negara yang ada di kawasan tersebut dalam rasa yang aman. Sedangkan enmity adalah hubungan yang dibangun berdasar pada permusuhan dan rasa curiga satu sama lain. Enmity dalam suatu kawasan bisa dilihat melalui sejarah konflik dan benturan kepentingan yang mendominasi pola hubungan yang terjalin. Perubahan kuantitas dan kualitas angkatan bersenjata oleh negara



merupakan salah satu respon atas hubungan yang tidak baik atau hubungan yang berdasarkan rasa curiga.<sup>25</sup>

Analisis terhadap konstruksi sosial yang terbentuk sangat ditekankan dalam variabel ini dengan menganalisis persepsi negara, latar belakang sejarah dan sosial dalam kawasan. Melalui variabel ini dapat dilihat bagaimana dinamika perimbangan kekuatan menciptakan security dilemma dan mutual distrust yang mendorong pola hubungan enmity dan amity. Beberapa negara-negara di kawasan Asia Timur sendiri telah memiliki kekuatan yang besar, seperti China, Jepang, Taiwan, Korea Utara dan Korea Selatan. Pola hubungan amity ini dapat terlihat antara hubungan Cina dan Korea Utara di mana kerja sama ekonomi dan infrastruktur di berbagai bidang mulai dilakukan secara bertahap sejak tahun 2000, Cina merupakan investor terbesar bagi Korea Utara dalam bidang transportasi sebagai sarana infrastuktur industri. Lalu hadirnya Amerika Serikat, dalam aliansi pertahanan dengan Jepang dan Korea Selatan di kawasan Asia Timur turut mewarnai pola hubungan tersebut. Amerika tentunya akan terus membangun aliansinya bersama dengan Jepang dan Korea Selatan untuk mengamankan mitra keamanannya.

Sementara pola enmity terlihat antara dua kubu yakni Korea Utara dan Korea Selatan yang secara tidak langsung terlihat oleh keberpihakan aliansi mereka, maka Amerika dan China tentunya menjadi dua kutub lawan yang berbeda. Sementara munculnya isu reunifikasi menambah daftar panjang bagi hubungan yang kompleks antara China dan Taiwan di kawasan tersebut.

---

<sup>25</sup> Buzan and Waever, p. 50

Adapun pola enmity yang dikatakan lebih dominan dalam tatanan keamanan kawasan Asia Timur tidak hanya tercermin dalam instabilitas isu denuklarisasi di kawasan, namun juga bagi hubungan Cina dan Jepang yang memiliki sejarah masa lalu yang kelam maupun adanya konstentasi pengaruh kekuatan yang mencakup skala global antara persaingan Cina dan Amerika Serikat. Dalam berbagai keadaan, persaingan antar dua negara adidaya yakni Amerika dan China, serta upaya penguatan militer China yang hadir sebagai hegemoni baru di kawasan tentunya dapat mempengaruhi pola yang terjadi.

Melalui keempat variabel diatas, dapat terlihat bahwa modernisasi militer China menunjukkan betapa besar perkembangan ekonomi dan militer China terutama di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Dalam ranah geografis, pengaruh modernisasi militer China merupakan salah satu isu keamanan yang banyak disorot oleh negara-negara dalam kawasan Asia Timur dengan menunjukkan kesiapan China untuk menghadapi perang yang lebih modern dengan senjata berteknologi tinggi, hal ini tentunya dapat mengancam siapapun yang menjadi rival China dan memiliki konflik sengketa dengan negara tersebut. Selain itu, dampak dari kebijakan Cina dalam meningkatkan anggaran militer dan peningkatan kemampuan militernya mampu menjadi pemicu munculnya perlombaan senjata di kawasan Asia Timur. Ketiadaan struktur anarki di kawasan Asia Timur menjadikan modernisasi militer China menjadi salah satu kekhawatiran bagi negara kawasan dengan ketiadaan institusi regional yang mampu menjembatani penyelesaian konflik yang terjadi, sangat dimungkinkan bagi China untuk menggunakan kekuatan militer dalam proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sengketa wilayah

maupun penyelesaian konflik lainnya. Kemampuan militer Cina membentuk suatu dilemma apakah peningkatannya akan berlangsung damai atau mengancam stabilitas keamanan.<sup>26</sup>

Dalam polarisasi kekuatan, bangkitnya pertumbuhan militer tentu mampu membuat China untuk memobilisasi *hard power* yang lebih aktif terhadap negara-negara tetangga di kawasan, adanya perluasan pengaruh China di kawasan, reunifikasi dengan Taiwan dan sengketa klaim teritorial Laut China Selatan adalah situasi yang mendorong China untuk mengupayakan penguatan teknologi maritim dan kapabilitas militernya. Polarisasi kekuatan inilah yang menjadi variabel bagi modernisasi militer China untuk mengukur respon dari negara-negara di Asia Timur terhadap modernisasi militer China selama era Xi Jinping. Terakhir dalam konstruksi sosial yakni hubungan *amity* dan *enmity*, kurangnya transparansi bagi anggaran belanja militer China yang disinyalir terus mengalami peningkatan setiap tahunnya tentu menimbulkan kekhawatiran bagi *middle powers* di kawasan. Posisi Cina sebagai kekuatan bagi kawasan sekaligus *great power* dalam konteks global memainkan peran penting bagian konstruksi sosial di kawasan, negara-negara dalam kawasan tentu menimbang kembali jika harus menghadapi kekuatan militer yang kuat dan canggih seperti China, hubungan kerjasama akan dinilai lebih menguntungkan bagi negara-negara kawasan dalam menghadapi dilemma keamanan.

---

<sup>26</sup> Bader, J. 2016. "A Framework for U.S. Policy Toward China". <https://www.brookings.edu/research/a-framework-for-u-s-policy-toward-china/>. (05/03/2022, 14:22 WITA)

Melalui lingkup penjelasan diatas, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pengaruh modernisasi militer China era Xi Jinping, maka aspek utama yang harus diperhatikan dalam variabel tersebut adalah respon dari negara-negara di Asia Timur terkait dengan modernisasi militer China. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah melihat bagaimana pengaruh modernisasi militer China dengan kompleksitas keamanan di kawasan Asia Timur.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian eksplanatif. Jenis penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan mengapa satu fakta atau kondisi tersebut dapat terjadi dan bagaimana hubungannya dengan fenomena lainnya. Peneliti melakukan pengamatan terhadap hubungan variabel yang sudah tercantum dalam penelitian, serta menguji hipotesa.<sup>27</sup> Jadi dalam hal ini peneliti ingin mengamati atau meneliti tentang bagaimana pengaruh modernisasi militer China selama pemerintahan di era Xi Jinping di kawasan Asia Timur sehingga adanya kompleksitas keamanan dalam kawasan tersebut. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui secara lebih dalam mengapa modernisasi militer memberikan pengaruh terhadap kompleksitas keamanan di kawasan.

### **1.6.2 Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis berupaya untuk mengumpulkan data sebagai kelengkapan dan alat penunjang penelitian. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>27</sup> Flick, Uwe. 2009. "Qualitative and Quantitative Research", *An Introduction to Qualitative Research*. London: SAGE, pp. 23-34.

analisis data secara induktif dimana penelitian ini berangkat melalui teori khusus yang memiliki batasan eksklusif dan pada akhirnya akan diuji ke dalam fenomena ataupun kronologi yang umum.<sup>28</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu informasi-informasi tentang fenomena yang disimbolkan bukan dengan angka, tetapi dengan kata-kata yang berorientasi pada makna dan hubungan antarvariabel yang membentuk suatu fenomena tersebut.

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah<sup>29</sup>. Data-data yang telah terkumpul dikaji menggunakan pendekatan analisis logis yaitu pencarian hubungan antara variabel-variabel dan konsep-konsep. Dalam pendekatan ini, langkah pertama adalah memetakan data ke dalam kategori yang ada. Kemudian data-data tersebut dicari hubungannya satu sama lain sesuai dengan kerangka logika yang dipersiapkan. Pada akhirnya proses ini akan menghasilkan sebuah konstruksi pemahaman tentang fenomena yang menjadi topik dari penelitian ini.

### **1.6.3 Tingkat Analisa**

Sebagai sebuah disiplin ilmu hubungan internasional, maka penulis dituntut untuk mampu mendeskripsikan, menjelaskan dan meramalkan fenomena internasional yang terjadi. Dimana salah satu kunci keberhasilannya yakni dengan menentukan tingkat analisisnya (*level of analysis*) yang digunakan dalam

---

<sup>28</sup> Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan (2005)

<sup>29</sup> Ulber, Silalahi. "*Metode Penelitian Sosial*". Bandung: PT. Refika Aditama (2009): p.77

memahami fenomena sosial yang terjadi. Perlu diketahui bahwa unit eksplanasi atau *variabel independen* adalah obyek yang mempengaruhi unit analisa yakni Modernisasi Militer China di masa pemerintahan Xi Jinping, sementara unit analisa atau yang disebut juga *variabel dependen* merupakan sebuah obyek yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas dalam hal ini yakni kawasan Asia Timur. Dengan demikian, dalam melakukan penganalisaan masalah, unit analisa dan unit eksplanasi saling terkait. Adapun tingkat analisa dalam penelitian ini adalah analisa model reduksionis yaitu unit eksplanasinya lebih rendah tingkatannya daripada unit analisa.

#### **1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian**

##### **A. Waktu Penelitian**

Batasan waktu yang diambil dalam penelitian ini adalah antara tahun 2013 dimana pada saat itu dimulainya masa pemerintahan Xi Jinping hingga tahun 2022 atau saat ini. Melalui berbagai macam latar belakang dan tinjauan historis guna melengkapi dan menjelaskan uraian yang dimaksud dengan pertimbangan bahwa selama itu masih ada atau memiliki korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang diangkat. Batasan waktu ini dimaksudkan agar penulis dapat tetap terfokus terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, juga agar membantu penulis dalam melakukan pengumpulan data.

##### **B. Batasan Materi**

Adapun tujuan untuk menentukan batasan materi di sini adalah agar pembahasan penelitian ini mengenai fenomena yang diamati tidak keluar dari kerangka penelitian yang ditentukan. Upaya pembatasan masalah ini

dimaksudkan agar di samping penulis dapat tetap fokus perhatiannya, juga membantu penulis dalam menganalisis data yang sesuai dengan kerangka pemikiran penelitian ini. Sebagai pembatasan dalam materi atau topik dalam penelitian ini yakni penelitian ini hanya membahas mengenai bagaimana Modernisasi militer China selama era Xi Jinping. Modernisasi tersebut akan memberikan pengaruh bagi dinamika kompleksitas keamanan di kawasan Asia Timur.

### **1.6.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka. Dalam teknik pengumpulan data penulis akan mengeksplorasi data yang sesuai dengan pembahasan tentang modernisasi militer China dan dinamika keamanan kawasan di Asia Timur. Dalam metode ini, dilaksanakan dengan cara mencari data-data yang ada serta berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari berbagai buku atau literature, dokumen, jurnal, artikel, maupun informasi dari media cetak lainnya yang relevan dengan masalah-masalah yang diamati. Setelah dikumpulkan, data diseleksi dan dikelompokkan kedalam beberapa bab pembahasan yang disesuaikan dengan sistematika penulisan.

### **1.7 Hipotesis**

Penelitian ini mengambil hipotesis bahwa modernisasi militer pada era pemerintahan Xi Jinping menunjukkan peningkatan kekuatan militer yang signifikan melalui peningkatan anggaran belanja militer, sistem persenjataan yang semakin modern, dan efektivitas personel PLA. Peningkatan militer ini tentunya untuk menghadapi pengaruh Amerika Serikat di kawasan, memenangkan sengketa

teritorial dengan Taiwan, melawan intervensi oleh pihak ketiga dalam konflik, serta menguatkan pengaruh China di kawasan. Dalam konsep keamanan di kawasan, peningkatan modernisasi militer di era Xi Jinping memberikan sedikit banyak pengaruhnya pada tiap variabel yang tersusun dalam teori kompleksitas keamanan kawasan atau RSCT. Keinginan China untuk menggeser posisi Amerika sebagai hegemoni dan memenangkan pengaruh yang besar tentunya terlihat dalam upaya modernisasi militer yang dilakukannya. Pengaruh dari modernisasi militer China juga berimbas kepada hubungan *amity* dan *enmity* yang telah terjalin antar kawasan, selain itu polarisasi kekuatan China akan semakin menguat di kawasan. Hal ini menjadikan kawasan Asia Timur menjadi kawasan yang semakin dinamis dan terciptanya super kompleks di kawasan.

### **1.8 Struktur Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis akan menyusun rencana pembabakan tugas akhir dalam lima bab. Dalam BAB I dimulai dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu (*literature review*), landasan teori dan konsep, kerangka pemikiran, metodologi penelitian (melingkupi jenis penelitian, teknik analisis, tingkat analisa, variabel penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik dan alat pengumpulan data), sampai dengan hipotesa/argumen pokok. Selanjutnya, dalam BAB II penulis akan membahas secara khusus mengenai modernisasi militer China yang dimulai dengan latar belakang dan sejarah modernisasi militer di era Deng Xiaoping dan beralih ke era Hu Jintao, kedua tokoh ini memiliki latar belakang yang sangat mempengaruhi modernisasi militer bagi China, lalu secara komprehensif membahas modernisasi



militer di era Xi Jinping dengan fokus pada tiap-tiap unit PLA dan perkembangannya selama masa kepemimpinan Xi.

Beralih pada BAB III dimana penulis lebih memfokuskan kepada pembahasan kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur dengan menggunakan konsep RSCT. Dalam Bab ini penulis akan menjabarkan sebuah studi komparasi keamanan Asia Timur dan pengaruh China di dalamnya semenjak modernisasi militer di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Pada BAB IV, penulis akan mempertemukan variabel independen dan variabel dependen untuk penulis analisis, melalui bab ini akan berisi tentang kondisi keamanan dan kompleksitas keamanan di Asia Timur dengan adanya modernisasi militer China di era Xi Jinping selama periode 2013-2022, melalui uji teori inilah penulis akan menemukan jawaban dari rumusan masalah yang penulis tentukan sebelumnya, yakni bagaimana pengaruh modernisasi militer China di era Xi Jinping terhadap kompleksitas keamanan di Asia Timur. Terakhir, pada BAB V yakni bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan bagi penelitian selanjutnya.